

“Analisa Sistem Informasi Perijinan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.”

Diky Firdaus, S.Kom.,M.M
Drs. Yana Setiawan, M.M
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Garut

RINGKASAN

Transportasi jalan tidak dapat dipisahkan dengan transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasikan kemajuan di masa depan. Seiring berjalannya perkembangan informasi maka transportasi jalan semakin mempunyai peranan yang penting, karena transportasi dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Penyediaan sarana dan prasarana yang ada di jalan kiranya mutlak dilakukan untuk menunjang lancarnya transportasi. Demikian pula dengan pelayanan pembuatan perijinannya, disamping tersedianya dukungan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang lalu lintas. Lalu lintas ini juga akan menjamin ketertiban, keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Sistem informasi pembuatan perijinan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tidak ada laporan tiap bulan dan terlalu banyak fisik arsip, sehingga akan menyulitkan pada proses pencarian data jika sewaktu-waktu diperlukan. Sehingga perlu adanya design sistem informasi baru guna menunjang pada proses pencarian data kendaraan.

Kata Kunci ; Lalu lintas, Perijinan, Sistem Informasi

1. PENDAHULUAN

Sektor transportasi memiliki fungsi melayani mobilitas orang, barang dan jasa, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Sektor ini berperan sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya. Sektor transportasi merupakan unsur yang penting dan dapat dikatakan sebagai urat nadi dalam kehidupan bangsa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, persatuan dan kesatuan bangsa serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan.

Pada saat sekarang ini kegiatan sosial masyarakat dengan berbagai aktivitasnya akan sangat tergantung kepada bidang komunikasi dan transportasi. Transportasi memberikan solusi percepatan terhadap akses kegiatan masyarakat. Dengan lancarnya transportasi maka segala bentuk kegiatan akan berjalan lancar pula.

Penyelenggaraan lalu lintas perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian perlengkapan jalan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas.

Transportasi jalan tidak dapat dipisahkan dengan transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasikan kemajuan di masa depan. Seiring berjalannya perkembangan informasi maka transportasi jalan semakin mempunyai peranan yang penting, karena transportasi dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Transportasi mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan transportasi lainnya. Setiap pelosok dapat dijangkau karena adanya alat transportasi tersebut dan transportasi juga dapat membantu memenuhi harapan masyarakat untuk menjangkau daerah-daerah sampai yang terpencil sekalipun.

Penyediaan sarana dan prasarana yang ada di jalan kiranya mutlak dilakukan untuk menunjang lancarnya transportasi. Demikian pula dengan pelayanan pembuatan perijinannya, disamping tersedianya dukungan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang lalu lintas. Lalu lintas ini juga akan menjamin ketertiban, keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Jalan pada fungsinya diperuntukkan bagi kepentingan lalu lintas umum, dalam pelaksanaannya jalan dapat digunakan di luar kepentingan lalu lintas dan oleh karena itu harus dikendalikan guna menghindari gangguan kepentingan umum sebagai akibat terganggunya fungsi jalan.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini, dimana cepatnya arus informasi yang menuntut para aparatur pemerintah untuk lebih banyak berbuat bagi masyarakat. Petugas Dinas Perhubungan juga harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat dan dituntut pula terbebas dari praktek-praktek yang menimbulkan biaya tinggi dengan tingkat kualitas kerja yang rendah.

Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu unjuk kerja yang diharapkan, maka efisiensi dan efektivitas kerja menjadi suatu tolak ukur dalam konteks pelayanan pembuatan perijinan terhadap masyarakat.

Dari hasil observasi diperoleh informasi bahwa pelayanan pembuatan perijinan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut perlu ditingkatkan. Karena adanya kendala pada sistem informasi pembuatan perijinan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut yaitu tidak ada laporan tiap bulan dan terlalu banyak arsip, sehingga akan menyulitkan jika sewaktu-waktu diperlukan. Pelayanan perijinan pemasangan perlengkapan jalan membutuhkan waktu yang lama karena tidak setiap mengajukan langsung dilaksanakan tetapi menunggu sampai 3 bulan yang akan datang. Pengolahan data yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut masih belum optimal bila diperhatikan, sumberdaya komputer yang tersedia belum digunakan secara efektif yaitu belum adanya system database untuk perhitungan kecepatan, kepadatan, VC ratio dan tingkat kecelakaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk merancang suatu sistem informasi untuk mengaktifkan data perijinan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Sehingga kami menekankan Laporan penelitian ini pada : Perancangan Sistem Informasi Perijinan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

2. Rumusan dan Batasan Masalah

Dalam perancangan sistem informasi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem informasi pengolahan data perijinan lalu lintas yang sedang berjalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana merancang system informasi perijinan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut yang berbasis komputer ?

4. Tinjauan Pustaka

McLeod (2001:9) mengemukakan bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Johnsons, Kast dan Rosen Zweig “Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dan terorganisasi dengan baik, yang terdiri dari dua buah atau lebih bagian (unsur) yang interdependen untuk mencapai satu tujuan”. Menurut Jogiyanto (1999:700) Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

1. Pengertian Perijinan Lalu Lintas

Menurut UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengemukakan bahwa Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan atau pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat.

2. Jenis Perijinan Lalu Lintas

Menurut Perda No. 8 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan perhubungan membagi Perijinan Lalu Lintas menjadi tiga bagian diantaranya ;

a. Perijinan Pemasangan Perlengkapan jalan

Perijinan pemasangan perlengkapan jalan yaitu ijin yang dilakukan oleh suatu pihak atau badan usaha terhadap dinas perhubungan untuk mendapatkan persetujuan memasang atau mengganti perlengkapan jalan yang kondisinya sudah rusak.

b. Perijinan Penggunaan Jalan

Bahwa setiap badan hukum atau perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas

Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas. Seluruh biaya untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang timbul sebagai akibat penggunaan jalan baik yang mengakibatkan penutupan jalan maupun tidak menjadi beban pemohon.

c. ANDALL

ANDALL adalah Analisa Dampak Lalu Lintas dimana setiap pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan lalu lintas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas,

wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Analisis dampak lalu lintas dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidang dan akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan menjadi syarat dikeluarkannya Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (IPPT) dan izin bangunan. Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas berbentuk rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

5. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini sebagai penelitian terapan, yaitu :

1. Ingin mengetahui bagaimana sistem informasi pengolahan data perijinan lalu lintas yang sedang berlangsung.
2. Merancang sistem informasi pelayanan pembuatan ijin lalu lintas yang lebih efektif sesuai dengan harapan masyarakat.

Dimana tujuan umum dari penelitian ini adalah memprediksi aktifitas sistem informasi perijinan lalu lintas untuk kendaraan umum yang dikembangkan menjadi sistem informasi model baru sehingga lebih efektif dan efisien.

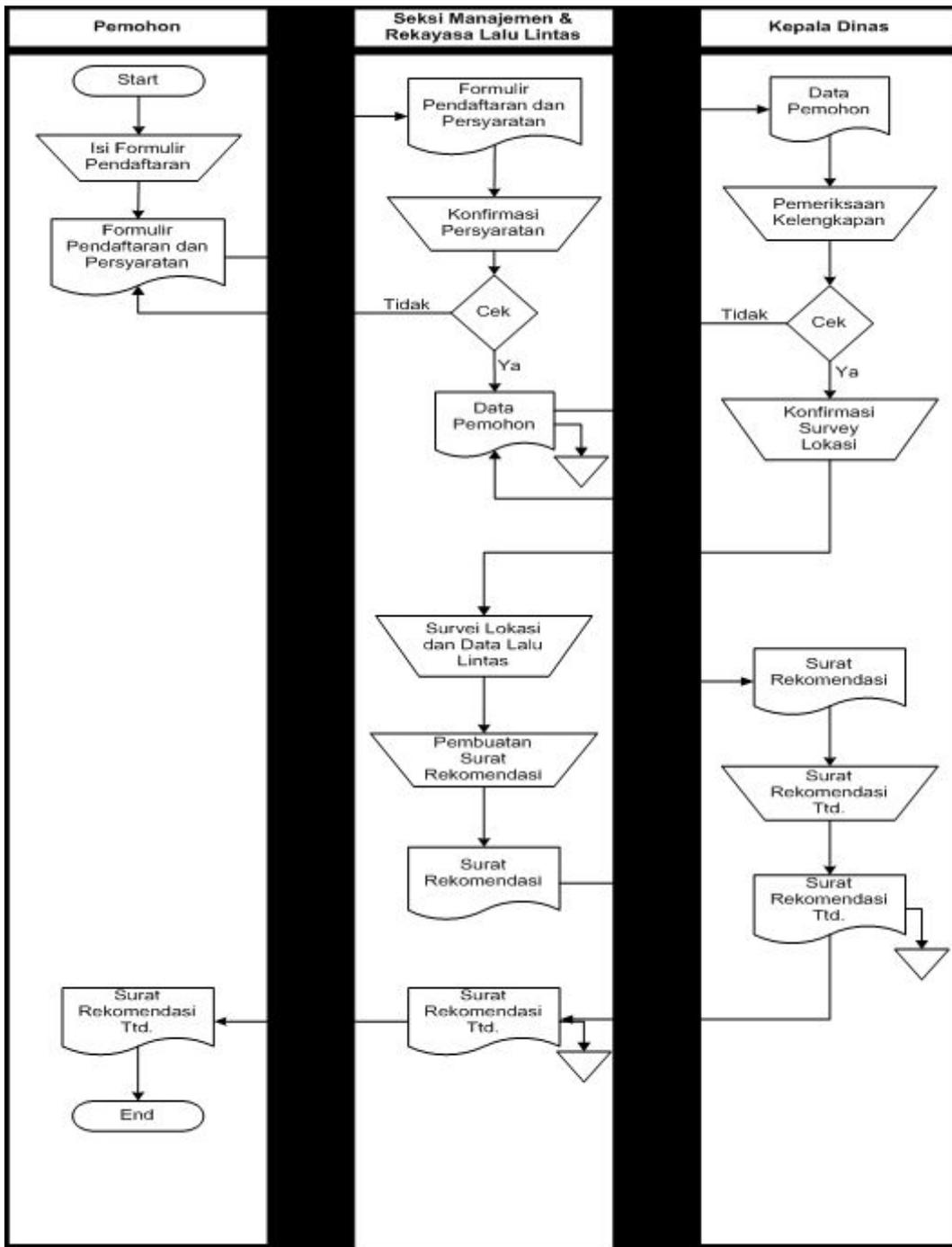
Sedangkan manfaat dari hasil pengamatan ini terbentuknya sebuah model sistem informasi dengan flowmap sebagai blueprint yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk Dishub Kab. Garut sebagai acuan pembangunan sistem informasi manajemen.

6. Metode Penelitian

Kami menggunakan jenis penelitian metode tindakan dan metode evaluasi. Hal ini dilakukan guna menghasilkan sistem yang lebih efektif dan sesuai dengan harapan sebagaimana menurut Soedibjo Bambang; "Jenis penelitian tindakan merupakan penelitian yang bertujuan mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Dan metode Evaluasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat sampai berapa jauh suatu sistem baru telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan".

Penulis pada tahap membuat dan mengembangkan model sistem informasi perijinan lalu lintas pada Dishub Garut, harapan dapat menciptakan model sistem informasi yang lebih efektif dan efisien. Serta bila ditindaklanjuti dengan berbagai sumberdaya teknologi informasi maka dapat mencapai sasaran organisasi dengan tepat dan efisien.

7. Hasil yang dicapai



Gambar 1 Flowmap Prosedur Kerja Perijinan Yang Sedang Berlangsung Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

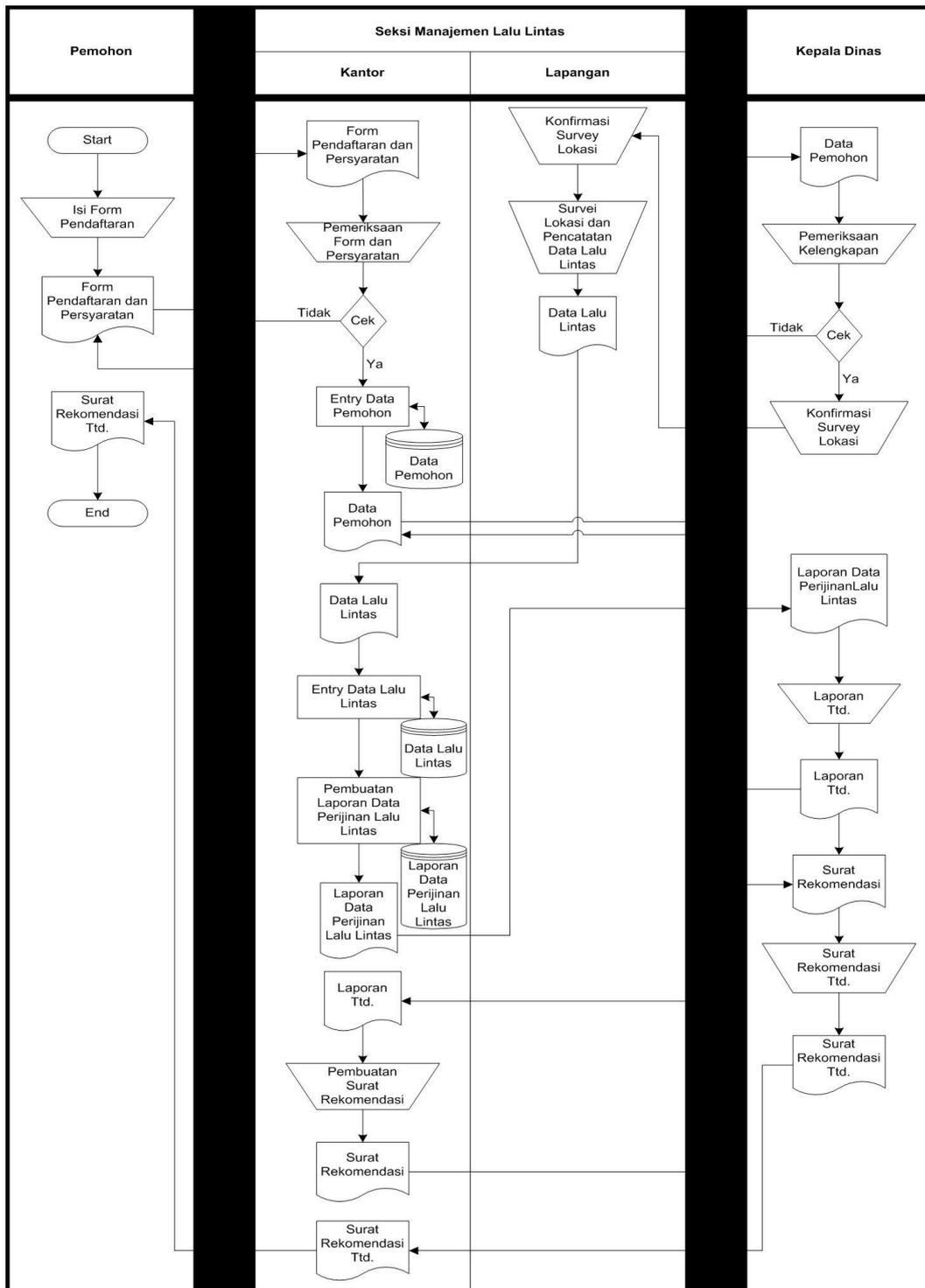
& Evaluasi Sistem Lama

Berdasarkan gambaran dan uraian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menganalisis serta mengevaluasi terhadap sistem informasi pengolahan data perijinan lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

Adapun hasil evaluasi terhadap sistem lama tersebut adalah :

1. Adanya keterlambatan dalam proses pembuatan ijin ANDALL. Penyebab dari permasalahan ini adalah proses yang dilakukan di Dinas Perhubungan melalui banyak tahap manual. Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan pembagian kerja dan prosedur pembuatannya pada bagian tertentu, untuk meningkatkan efisiensi kinerja sistem dengan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat.
2. Dari segi keamanan data perlu diperbaiki, karena data yang ada sifatnya masih dapat diakses oleh setiap orang sehingga kemungkinan untuk diubah oleh orang yang tidak berkepentingan besar sekali.
3. Pengendalian data yang tidak terkontrol sehingga tidak mampu menyediakan laporan yang berkualitas yang sifatnya mendadak.
4. Di Dinas Perhubungan Kabupaten Garut menyediakan fasilitas komputer tetapi hanya digunakan sebagai alat pengetikan saja.
5. Data pemohon yang telah mendapat surat rekomendasi tidak dapat diperoleh secara mendadak.

9. Design Sistem informasi baru



Gambar 2 *Flowmap* Prosedur Kerja Yang Diusulkan Pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Garut

A. Prosedur Kerja Yang Baru

Adapun prosedur kerja yang diusulkan dalam pengolahan data perijinan lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, dengan mengisi formulir pendaftaran disertai dengan persyaratan yang ditujukan kepada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
2. Setelah Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menerima formulir pendaftaran yang diajukan pemohon, persyaratan akan diperiksa oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Jika persyaratan lengkap maka akan dilakukan *entry* data pemohon, tetapi jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Data pemohon akan diberikan kepada kepala dinas untuk diperiksa, apakah layak atau tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, apabila persyaratan lengkap maka kepala dinas akan memberikan konfirmasi kepada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bagian lapangan untuk melakukan survei lokasi, jika tidak lengkap maka data pemohon akan dikembalikan kepada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bagian kantor.
4. Setelah mendapat konfirmasi dari kepala dinas maka Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang ada di lapangan akan melakukan survey lokasi dan mencatat data lalu lintas yang diajukan pemohon.
5. Data lalu lintas yang telah dicatat oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di lapangan kemudian diserahkan kepada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang ada di kantor untuk dimasukkan ke dalam komputer atau dilakukan *entry* data lalu lintas.
6. Setelah melakukan *entry* data lalu lintas maka Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas akan membuat laporan tentang data-data pemohon dan data perijinan lalu lintas.
7. Laporan akan diserahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani, setelah laporan ditandatangani maka akan dikembalikan kepada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
8. Setelah membuat laporan maka Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas akan membuat surat rekomendasi kemudian diserahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani.
9. Setelah surat rekomendasi ditandatangani oleh kepala dinas, maka akan dikembalikan kepada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk diarsipkan serta akan diberikan kepada pemohon sebagai tanda bukti pemohon telah mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

10. Rencana tahapan berikutnya

Pada tahapan berikutnya kami akan mencoba untuk menjelaskan dan menerangkan model baru ini harapan dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait sebagai acuan pengembangan system informasi Dinas Perhubungan Garut dan dibuatkannya jurnal ilmiah.

Bab VII. Kesimpulan dan
Saran

Keimpulan pada penelitian ini kami berusaha untuk menemukan hambatan pada aktifitas perijinan lalu lintas yang telah diketahui diantaranya;

1. System informasi yang terjadi belum efektif dikarenakan pemahaman penggunaan teknologi informasi yang masih relative terbatas, hal ini dapat dilihat dari gambar model 4.1.
2. Setelah kami kembangkan dan dibuatkan model system informasi yang baru, system informasi dapat dinilai efektif, hal ini diukur dari informasi yang akan dihasilkan melalui teknologi informasi yang dirancang.

11. Daftar Pustaka

Jogiyanto, HM. (1999). *Pengenalan Komputer*. Edisi Ketiga. Andi Yogyakarta.

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. AJ.401/2/3/DPRD/92 tentang

Persyaratan Teknis Rambu Lalu Lintas di Jalan.

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. AJ.401/2/3/DPRD/92 tentang

Persyaratan Teknis Rambu Lalu Lintas di Jalan.

McLeod, Raymond. (2004). *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi Kedelapan. Jakarta: PT.

Intermasa.

Soedibjo Bambang, (edisi 2, 2005). *Pengantar Metode Penelitian*.